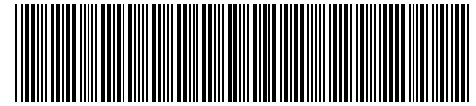




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099239/2024**



DS:0305-0000-4937-8731

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
  2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
  3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
  4. Kode>Nama Satker : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
- Sebesar : Rp. 472.960.000 ( EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 472.960.000  
Rp. 472.960.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	472.960.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 472.960.000

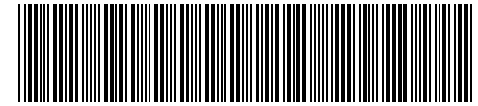
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099239/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0305-0000-4937-8731

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Halaman : I A. 1

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			472.960.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			472.960.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Tata Kelola Administrasi Peradilan umum yang di susun			
		2. 01	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum			
		3. 01	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum			
		4. 02	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara			
		5. 02	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu			
		6. 03	-			
		7. 03	Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.AEA	Koordinasi	3,00	kegiatan	20.000.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Percepatan Penyelesaian Perkara	3,00	kegiatan	20.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	993,00	Perkara, Berkas Perkara	408.960.000
Rincian Output	:	01	BCA.U08 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	889,00	Perkara	295.000.000
		02	BCA.U09 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	64,00	Perkara	60.000.000
		03	BCA.U10 Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	40,00	Perkara	53.960.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	137,00	Orang	44.000.000
Rincian Output	:	01	QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)	137,00	Orang	44.000.000

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099239/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0305-0000-4937-8731

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099239	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	-	472.960	-	-	-	472.960		
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	472.960	-	-	-	472.960		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	472.960	-	-	-	472.960		
1049.AEA	Koordinasi (13.00 KALIMANTAN BARAT / KALIMANTAN BARAT)	-	20.000	-	-	-	20.000	13 . 00	
01	RM	-	20.000	-	-	-	20.000	042	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	408.960	-	-	-	408.960	13 . 51	
01	RM	-	408.960	-	-	-	408.960	042	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	44.000	-	-	-	44.000	13 . 51	
01	RM	-	44.000	-	-	-	44.000	042	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>472.960</b>	-	-	-	<b>472.960</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099239/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0305-0000-4937-8731

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099239	<b>PENGADILAN NEGERI PONTIANAK</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	32.225	32.437	33.317	40.477	48.954	47.251	46.035	43.432	36.371	35.801	37.345	39.315	472.960
		<b>BELANJA BARANG</b>	32.225	32.437	33.317	40.477	48.954	47.251	46.035	43.432	36.371	35.801	37.345	39.315	472.960
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	32.225	32.437	33.317	40.477	48.954	47.251	46.035	43.432	36.371	35.801	37.345	39.315	472.960
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	32.225	32.437	33.317	40.477	48.954	47.251	46.035	43.432	36.371	35.801	37.345	39.315	472.960
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	10.035	10.035	10.035	10.035	10.035	10.035	10.035	10.035	10.035	10.035	10.035	10.053	120.438
		- PNB (425232)	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	7.080
		- PNB (425233)	3.559	3.559	3.559	3.559	3.559	3.559	3.559	3.559	3.559	3.559	3.559	3.566	42.715
		- PNB (425239)	5.886	5.886	5.886	5.886	5.886	5.886	5.886	5.886	5.886	5.886	5.886	5.897	70.643

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099239/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:0305-0000-4937-8731

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [099239] PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099239/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:0305-0000-4937-8731

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : [099239] PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002